



Judul : DPR Tetap Akan Selaraskan UU Cipta Kerja
Tanggal : Rabu, 20 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Tetap akan Selaraskan UU Cipta Kerja

REVISI Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bukan merupakan jalan pintas agar UU Cipta Kerja (Ciptaker) segera difungsikan setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menegaskan putusan MK agar dilakukan perbaikan UU Ciptaker tetap akan dilaksanakan sebagai amanah konstitusi. Pemerintah dan DPR diberi waktu dua tahun dari sejak putusan dibacakan pada 25 November 2021.

"Kami akan lakukan sesuai dengan amanah MK. Apa yang diamanahkan MK kami akan lakukan penyempurnaan dan diselaraskan dengan putusan MK. Apa saja keputusan MK maka kami akan selaraskan," tegasnya.

Guspardi mengatakan revisi UU PPP bertujuan menyempurnakan pembentukan perundang-undangan agar mengakomodasi model *omnibus law*, seperti UU Ciptaker, yang selama ini tidak dikenal.

"Jadi, kami melakukan sinkronisasi, harmonisasi, bagaimana pembentukan UU *omnibus law*. Adanya penyempurnaan UU PPP ini akan menyelaraskan, mengakomodasi, kalau ada UU atau apa pun, termasuk Ciptaker, yang menentukan *omnibus law*," tutur Guspardi.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS Ledia Hanifa mengingatkan UU PPP tidak berlaku surut. Oleh karena itu, seharusnya UU Ciptaker dibahas ulang.

"Harus dibahas ulang bahasan UU ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas di daftar kumulatif terbuka," ungkapnya.

Selain mengakomodasi metode *omnibus law*, RUU PPP akan mengembalikan fungsi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sebagai lembaga yang bertugas melakukan penomoran UU. Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan kewenangan itu tertuang dalam Pasal 85 ayat (1) RUU PPP.

"Pengundangan kembali ke Setneg seperti sebelum tahun 2005. Penomoran UU itu pada dasarnya ada di Setneg sehingga perubahan ketentuan ini pada dasarnya untuk memudahkan kerja," kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan pembahasan RUU PPP di Baleg sudah selesai dan pascarevisi akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengesahan. (Sru/Uta/P-2)